DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

A.M.W. Panarka dan Vidyandika Moeljarto,1996, *Pemberdayaan (Empowerment*), Penyunting : Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi,* CSIS, Jakarta

B. Arief Sidharta, 2000, *Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bambang Santoso, Abdul Haris, Iris Prasetyo, 2000, *Paradigma Baru Pengelolaan Pertanahan pada Era Otonomi Daerah*, Bappenas, Jakarta

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara diluar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, 2001, Bumi Aksara, Jakarta

Daniel S. Lev, 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan,* LP3ES, Jakarta, hlm. 158. Bandingkan Denys Lombard, 1996, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Jilid I, 2 dan 3,* Gramedia Pustaka Utama

David C. Korten, 1984, *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan,* dialihbahasakan oleh Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Yayasan Studi Pembangunan, Jakarta

Erman Rajagukguk, 2000, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra, Jakarta

Felix O. Soebagjo dan Erman Rajagukguk (ed), 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Indonesia

Gary Goodpaster, 1993, *Outline: Commercial Arbitration and International Commercial Arbitration,* ELIPS Project, Jakarta

Hadimulyo, 1997, *Mempertimbangkan ADR Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Elsam, Jakarta

Hilman Hadikusumo, 1992, *Pengantar Antropologi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Ken Blancard, 2002, *Empowerment Takes More A Minute*, Amara Books

Lawrence M. Friedman,1969, *On Legal Development, Rutgers Law Rview*, dialihbahasakan oleh Rachmadi Djoko Soemadio

Lorna Gilmour, Penny Hand, dan Cormac McKeown (eds.), 2007, *Collins English Dictionary and Thesaurus*, Third Edition, Harper Collins Publishers, Great Britain

Mas Achmad Santosa dan Anthony LP. Hutapea, *Mendayagunakan Mekanisme Alternatif Sengketa Lingkungan (MAPS) di Indonesia*, WALHI, Jakarta, 1992

R. Benny Riyanto, 2009, *Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Ronny Hanitijo Somitro, "*Studi Hukum dan Masyarakat"*, Bandung, Alumni, 1985

Rony Hanitijo Soemitro, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, Semarang, CV. Agung, 1990

Satjipto Rahardjo, 2008, *Lapisan-Lapisan dalam Studi Hukum,* Bayumedia Publishing, Malang

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetandyo Wignyosoebroto, "*Mencoba Memahami Pola Perilaku Pemakai Jalan Raya*", Yuridika No. 8, 1988

Syahrizal Abbas, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta

T.O. Ihromi (ed), 1984, *Anthropologi dan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta

Zainudin Ali, *Metode Penelitain Hukum*, 2009, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal, makalah dan koran

Achmad Santosa, *Pelembagaan ADR di Indonesia,* Makalah untuk menanggapi Laporan *Diagnotic Assesment of Legal Development in Indonesia*, Jakarta, September 1997

Eman Suparman, 2004, *Pilihan Forum Arbritase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

M. Yahya Harahap, 1997, *Kebijakan Memilih Menggunakan Istilah Perundingan Untuk Mewakili Negotiaton, Mediation Dan Conciliation*, Makalah pada Kuliah Umum ADR, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta

Charles Himawan, "*Hikmah Globalisasi Hukum",* Artikel dalam Harian Umum Kompas, 8 Mei 1993

Perundang-Undangan

Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial.

Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Perma No 2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Perpres No 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 maupun Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, keduanya mengatur tentang bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menggunakan kewenangannya dalam menangani/menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi di wilayahnya.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Petunjuk teknis badan pertanahan nasional republic Indonesia Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007